

Corruption Perception Index 2017

MENERA KORUPSI
DI TAHUN POLITIK

Apa itu CPI?

Indeks Gabungan

Hingga 13 sumber data

Persepsi

Pakar dan/atau
Pebisnis

Korupsi

Penyalahgunaan
wewenang untuk
kepentingan pribadi

Global

Hingga 180 negara

Sektor Publik

Pejabat Publik dan Politisi

CPI Indonesia 2017

Source Data

PRS International Country Risk Guide 2017

World Economic Forum EOS 2017

IMD World Competitiveness Yearbook 2017

Economic Intelligence Unit 2017

Bertelsmann Foundation Transform Index 2017

PERC Asia Risk Guide 2017

Global Insight Country Risk Ratings 2017

World Justice Project 2017

Varities of Democracy Project 2017

CPI in Average

Global

43

Asia Pacific

44

ASEAN

41

The Fact is

Average in
2015 & 2016

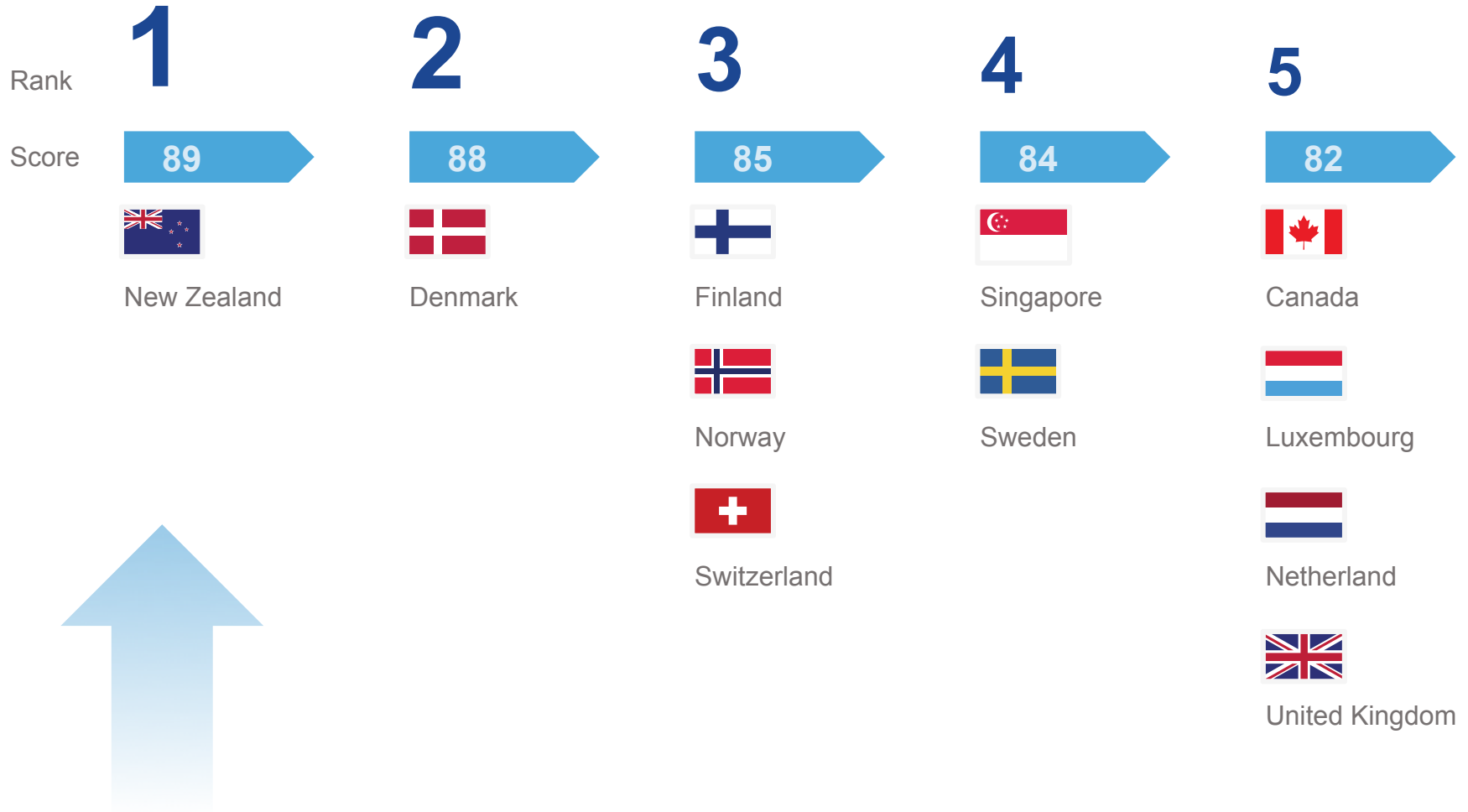
43

Country
Under Average

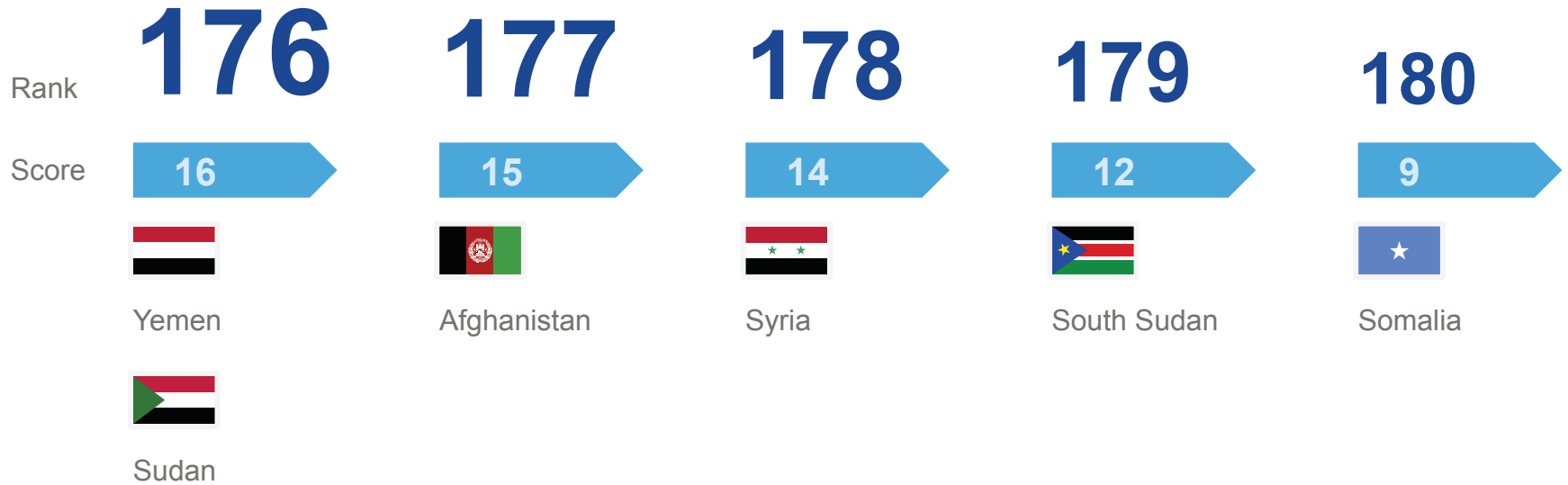
60%

106 from 180

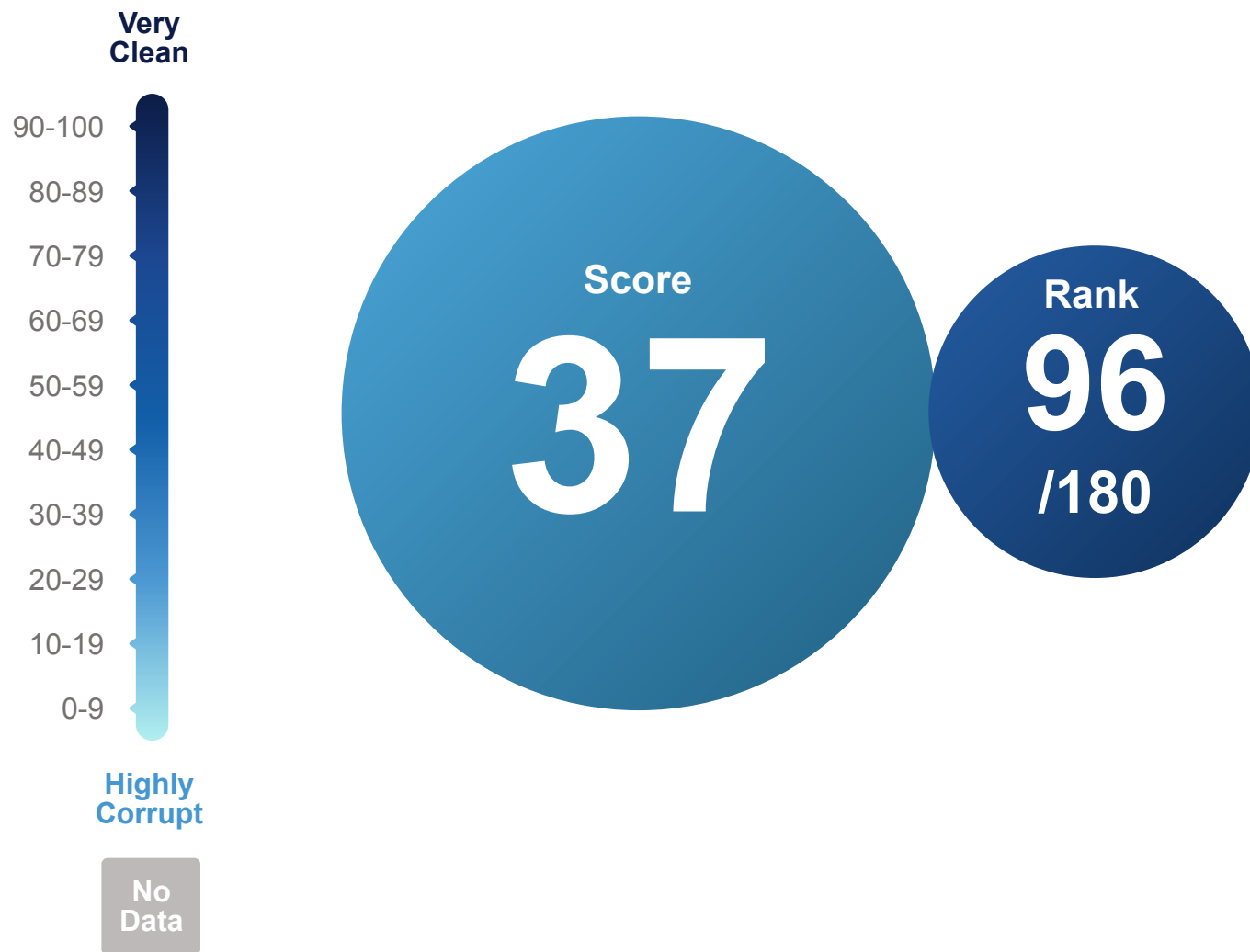
Top 5 Highest Global CPI



Top 5 Lowest Global CPI



Indonesia's CPI



Similar with Indonesia's CPI 2017



Brazil



Colombia



Indonesia



Panama



Peru



Thailand

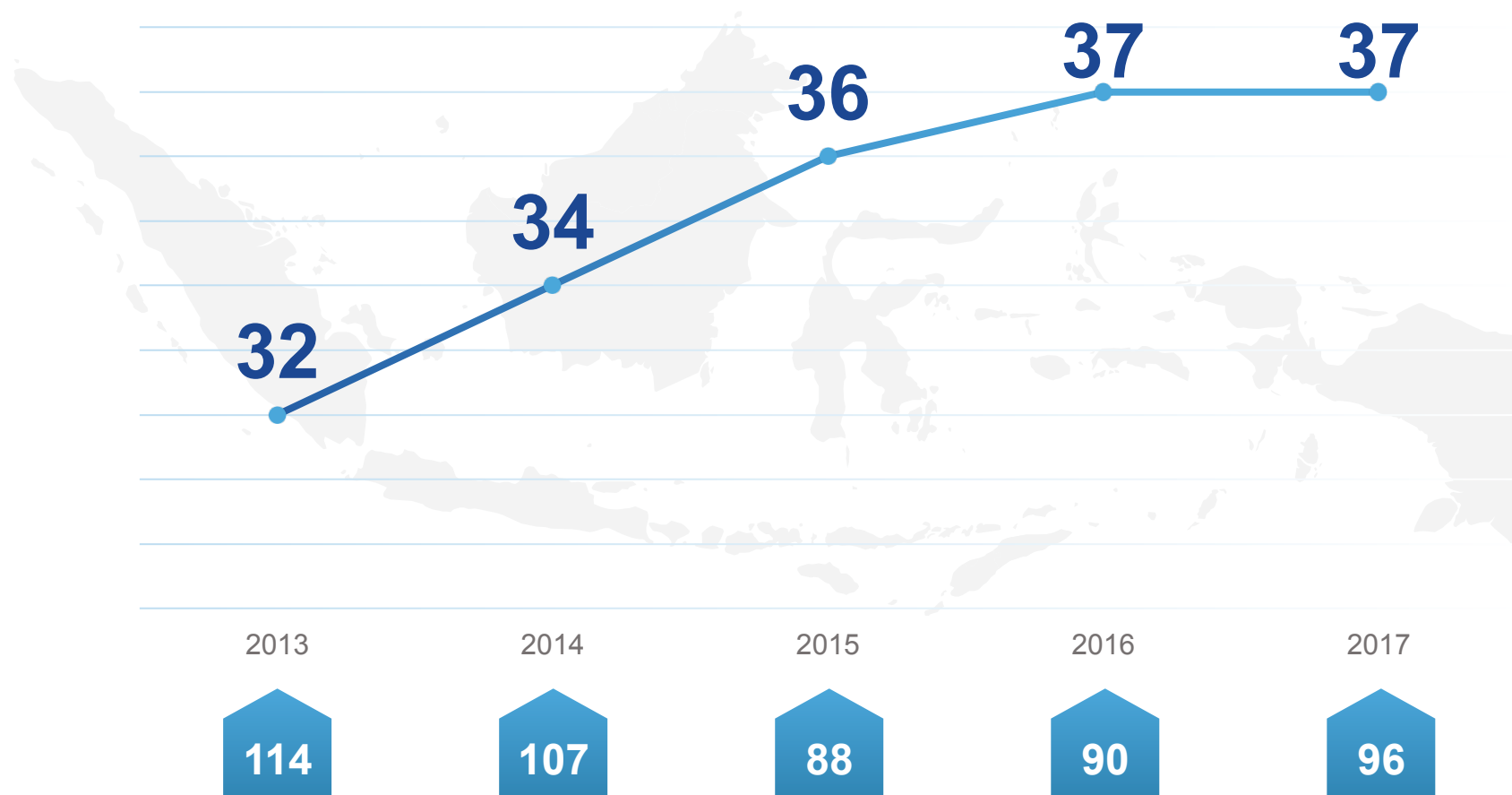


Zambia

ASEAN CPI

Rank	CPI 2017	Country	CPI 2016	
6	84	 Singapore	84	→
32	62	 Brunei Darussalam	58	↑
62	47	 Malaysia	49	↓
91	38	 Timor Leste	35	↑
96	37	 Indonesia	37	→
96	37	 Thailand	35	↑
107	35	 Vietnam	33	↑
111	34	 Philippines	35	↓
130	30	 Myanmar	28	↑
135	29	 Laos	30	↓
161	21	 Cambodia	21	→

5 Years Indonesia's CPI 2017

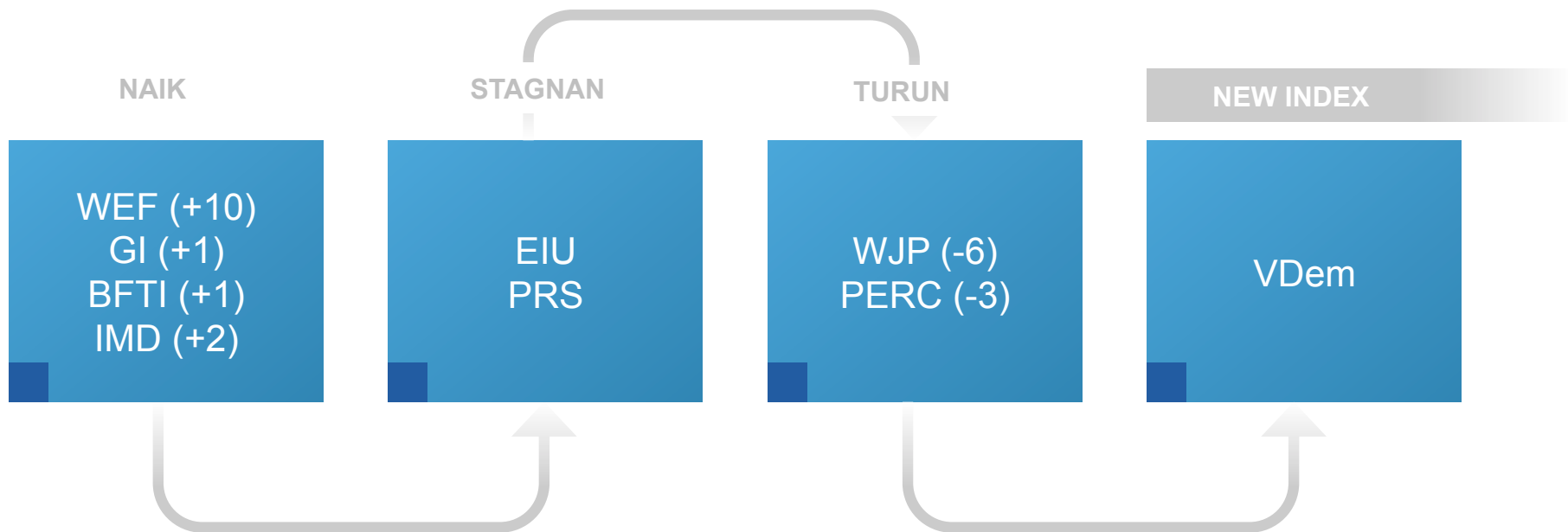


CPI Indonesia 2017

Source Data



Indonesia CPI Trends 2017



Highlight



World Economic Forum

Best performance in WEF.
A good improvement to support a clean business & investment.



Political Risk Service

Stagnant in PRS. The same condition on potential risk of corruption within the political system and suspiciously close ties between politics and business



World Justice Project

The descending on WJP. It explained by some of Gov't Official in Executive, Judicial, Legislature, Police, and Military still use public office for private gain



PRESIDEN dan PEMERINTAH

- Presiden segera mempercepat penandatanganan RanPerpres Antikorupsi
- Pemerintah, baik birokrasi dan APH bersinergi dalam mendukung Aksi PPK



DPR dan PARPOL

- DPR dan Parpol wajib menjalankan agenda antikorupsi, terutama dalam menghadapi tahun politik (Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres-Pileg 2019)
- DPR dan Parpol peserta Pemilu wajib untuk menolak segala bentuk korupsi

KPK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

- Upaya sinergi antara KPK dengan APH (Kepolisian dan Kejaksaan) semakin digiatkan dalam usaha PPK
- Penguatan kelembagaan KPK melalui optimalisasi anggaran, kemampuan dan jumlah personel untuk mendukung aksi PPK



KALANGAN SWASTA

- Mengembangkan sistem antikorupsi internal dan turut aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan menerapkan standar bisnis bersih dan antikorupsi.

Terima Kasih
